

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional sebagai misi pamungkas yang diperjuangkan dalam lingkup internasional. Sedangkan kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, ini bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat yang diperintahnya. Secara sederhana, diibaratkan (politik luar negeri) merupakan motivasi nantinya akan mendorong tindakan (dalam bentuk kebijakan luar negeri). Dinamika antara kondisi internal maupun eksternal saling mempengaruhi sehingga harus selalu dijaga agar tidak kontraproduktif satu sama lain dan kepentingan nasional yang menjadi prioritas dapat terpenuhi.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara besar yang saling bertetangga, takdir geografis memungkinkan interaksi di antaranya untuk lebih intensif. Richard Woolcott, seorang diplomat senior Australia berpendapat bahwa Indonesia harus selalu menjadi prioritas terpenting bagi negaranya mengingat potensi emasnya untuk mengendalikan pendekatan utara mereka, yakni melewati beberapa jalur laut dan udara paling strategis serta sumber peluang jangka panjang yang sungguh amat keliru apabila diabaikan (Mackie, 2007). Selain itu, Mohammad Hatta (1953) berpendapat oleh karena kondisi Indonesia yang terletak di antara dua benua (daratan Asia dan Australia) maupun dua perairan samudera luas (Hindia dan Pasifik) mengharuskan menjaga pertalian dengan kawasan yang membentang dalam lingkaran besar di sekitarnya. Urusan proteksi teritori selaras dengan masalah yang dihadapi tergambar jelas dari luasnya area Indonesia sebesar 3.000 mil dan terdiri atas ribuan pulau (baik besar maupun kecil), niscaya mustahil bebas ancaman kalau hanya andalkan kekuatan militer sendiri. Kemudian atas pertimbangan ekonomi, Indonesia tidak mungkin mengambil jalan dengan mengalineasi diri pada ekonomi beberapa negara. Terlebih lagi karena barang-barang ekspor tertentu

seperti karet acap kali alami fluktuasi harga. Maka langkah terbaik dapat ditempuh lewat kebijakan damai namun independen supaya bisa melindungi kepentingan ekonominya dengan baik. Situasi saling membutuhkan satu sama lain memang sulit untuk dihindarkan, ada pula kepentingan nasional masing-masing sehingga mendorong diversifikasi kerjasama dalam berbagai aspek.

Perjalanan sejarah telah menunjukkan naik turun hubungan kedua negara, *de Ronde Tafel Conferentie* (RTC) bermuara pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara resmi oleh Kerajaan Belanda pada bulan Desember 1949. Pemerintah Australia yang dipimpin oleh Robert Menzies, termasuk yang pertama mengakui negara baru tersebut. Kebijakan ini memang bukan tanpa alasan, perlu dipahami jika kepentingan keamanan Australia akan terpenuhi apabila Indonesia merdeka secara bertahap dan damai mengurus urusannya lewat pemerintahan mandiri (Adil, 1993). Relasi positif keduanya kembali tercapai setelah Perdana Menteri Paul Keating dan Presiden Soeharto berhasil membangun hubungan berlandaskan kepercayaan. Ini yang didukung oleh keterpaduan masing-masing pembantunya di bidang luar negeri, yakni Gareth Evans dan Ali Alatas dalam menelurkan sejumlah hal seperti *the Timor Gap Zone of Cooperation Treaty 1989*, *the Cairns Group*, *the Cambodian Peace Plan*, dan APEC. Tidak keliru bagi Perdana Menteri Keating untuk menjatuhkan pilihan pada Indonesia sebagai destinasi pertama kunjungan kerja luar negerinya. Keyakinan jika anjungsana adalah bentuk usaha untuk tunjukkan betapa sentral koneksi antarmasyarakat kedua negara membuahkan hasil manis. Secara nyata terkulminasi lewat *the Agreement on Mantaining Security 1995* yang dianggap mendobrak kebiasaan bebas aktif (Troath, 2019).

Kala reformasi bergulir tahun 1998 menandai langkah baru Indonesia yang telah beranjak meninggalkan masa lalunya. Dari alam otoriter yang dingin nan gelap, kini terasa penuh nuansa berwarna setelah menganut demokratisasi pada tiap lembaga negara. Akan tetapi, berbagai kejadian penting terjadi secara beriringan setelahnya membuat dua tetangga ini mempertanyakan signifikansi masing-masing. Pada bulan Desember 1998, Perdana Menteri John Howard dari *Liberal Party of Australia* (LPA) mengirimkan surat kepada Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

yang mendesak Indonesia untuk memberikan otonomi kepada Timor Timur (meski sebenarnya tidak eksplisit menekan untuk beri kemerdekaan). Ketika akhirnya Timor Leste resmi merdeka dan berdiri sendiri sebagai negara berdaulat, Indonesia menyalahkan Australia atas pemisahan wilayah itu dari Republik khususnya terkait kasus Papua. Ketika peristiwa Bom Bali terjadi di kawasan Kuta tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 orang Australia membuat Negeri Kanguru beranggapan jika kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi warganya dan aset mereka di luar negeri. Setelahnya diadakan kerjasama antarinstansi kepolisian dalam membongkar jaringan teroris Jemaah Islamiyah yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut (Smith, 2004). Serangkaian masalah ini menumbuhkan prasangka dan sentimen negatif, ketika Indonesia menganggap bahwasanya Australia adalah ancaman utama persatuan nasional maka Australia menilai Indonesia bukan lagi mitra kawasan yang dapat diandalkan terlebih menyangkut isu seputar keamanan.

Sikap Perdana Menteri Howard yang demikian memberi kesan menjaga jarak kepada tetangganya di Asia serta berusaha mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Secara konsekuensial ini memperkuat anggapan jika kepemimpinan Australia dijalankan oleh LPA akan condong sulit mewujudkan diri mereka sebagai “tetangga yang baik”. Ditandatanganinya *the Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation* (“Traktat Lombok”) oleh Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, menjadi pencapaian sekaligus kado terakhir dari Perdana Menteri Howard. Merefleksikan besarnya kepada perhatian spesifik terkait keamanan, pertahanan, dan militer yang melibatkan kedua negara.

Angin segar berembus lewat kemenangan *Australian Labor Party* (ALP) dalam Pemilihan Umum Federal Australia 2007 sekaligus mengukuhkan Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri, sosok yang memiliki tendensi kedekatan dengan budaya Asia karena kemampuannya dalam berbahasa Mandarin dan Indonesia dipilih menjadi destinasi pertama yang dikunjungi olehnya setelah dilantik. Pesaing

sekaligus penggantinya, Julia Gillard juga mampu mengelola hubungan bilateral terhadap Indonesia secara baik.

Sebelumnya meski ALP secara dramatis sukses mempertahankan pemerintahan minoritas pasca Pemilihan Umum Federal Australia 2010. Tony Abbott sebagai pemimpin LPA sekaligus oposisi berkampanye tentang masalah suaka mendapat penolakan Rudd, sedangkan jajak pendapat menunjukkan bahwa publik sangat mendukung pandangan anti-suaka Abbott. Walaupun demikian masih terdapat persoalan lain yang turut mengganjal, misalnya pada 2011 Pemerintah Australia telah menanggukkan ekspor sapi hidup ke Indonesia sampai pengamanannya diadopsi untuk mengakhiri pembantaian brutal sapi. Rasa muak dan kemarahan publik Australia muncul atas rekaman mengerikan dari rumah pemotongan hewan di Indonesia yang disiarkan dalam film dokumenter TV ABC (Woodley, 2011). Kembalinya kekuasaan Partai Liberal (LPA) baru dapat terjadi setelah menang telak pada Pemilihan Umum Federal Australia 2013, oposisi *Liberal-National Party* (LNP) *Coalition* berhaluan kanan-tengah yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Tony Abbott dari Partai Liberal Australia (LPA) dan mitra koalisi Partai Nasional Australia, yang dipimpin oleh Warren Truss, mengalahkan pemerintahan *Australian Labor Party* (ALP) Kevin Rudd (Murphy, 2013).

Perlu digarisbawahi pengelolaan hubungan bilateral secara otomatis lebih kompleks daripada di masa lalu, karena dampak penuh demokrasi pada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sisi positif terkait perumusan hingga pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dari mulai restrukturisasi birokrasi untuk mencerminkan prioritas baru dan meningkatkan efisiensi organisasi. Pergeseran mendasar dalam hubungan sipil-militer berefek pada sisi legal, organisasional, serta ide esensial dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri (Nabbs-Keller, 2013). Tetapi jika posisi Indonesia ditinjau dari *Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030* yang dirilis tahun 2009 oleh Pemerintahan Perdana Menteri Rudd, jelas mengindikasikan bahwa Indonesia dianggap lemah, terfragmentasi, dan dilanda masalah komunal yang pelik (seperti kemiskinan dan lembaga negara yang gagal) akan berpotensi menjadi sumber ancaman bagi keamanan Australia sendiri. Ini dianggap sama buruknya apabila rezim otoriter atau terlalu nasionalis menguasai

Jakarta secara konsekuensial akan timbulkan risiko strategis bagi tetangganya (Departement of Defence, 2009). Kemudian ini seketika berubah, nuansa optimisme memandang kekuatan Indonesia ditekankan dalam *Defence White Paper 2013* yang dikeluarkan Pemerintahan Perdana Menteri Gillard. Kemitraan dengan Indonesia sebagai hubungan pertahanan terpenting mereka di kawasan seiring keberhasilan tetangga utaranya menjalankan demokrasi dan melihat prospek pertumbuhan ekonomi dengan potensi menjadi salah satu ekonomi utama dunia (Departement of Defence, 2013).

Masa bulan madu (*honeymoon phase*) hubungan kedua negara yang dialami saat *Australian Labor Party* (ALP) berkuasa sejak 2007 di bawah Perdana Menteri Rudd dan Gillard otomatis harus berakhir dengan ditabalkannya *Liberal-National Party* (LNP) *Coalition* sebagai pemegang roda pemerintahan, pendekatan secara individual maupun kelompok individu (dalam hal ini Perdana Menteri Abbott dan *Liberal Party of Australia*) terhadap isu-isu terkait Indonesia berubah menjadi cenderung lebih agresif. Masa ini memiliki signifikansi karena Abbott sendiri menjanjikan perubahan dalam pendekatan kebijakan kepemimpinannya terhadap Indonesia, kritik terhadap tujuh tahun kebijakan luar negeri di bawah Partai Buruh sekaligus janji yang digaungkan sejak kampanye pada Pemilihan Umum Federal Australia 2013 berupa reorientasi "less Geneva and more Jakarta" (Shanahan, 2013). Sedangkan realitanya sejumlah masalah menyangkut pertahanan dan keamanan turut terjadi di periode ini, sebut saja terbongkarnya skandal penyadapan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia hingga persoalan imigran lewat pelaksanaan *Operation Sovereign Borders* (OSB) berlangsung saat pemerintahan Abbott. Pada periode ini pula setelah selama bertahun-tahun, orang Indonesia telah melihat partai politik di Australia, *Australian Labor Party* (ALP) cenderung ramah bagi Indonesia lewat agenda keterlibatan regionalnya dan sebaliknya, *Liberal Party of Australia* (LPA) terkesan lebih dekat serta memprioritaskan kemitraan dengan sekutu jauh seperti Inggris maupun Amerika Serikat dibandingkan Indonesia dalam pendekatannya terhadap urusan luar negeri.

Walau setelah Perang Dunia II mereka mengalihkan perlindungan dari Inggris ke Amerika Serikat, memang sejak lama pemimpin kedua kubu bereaksi

berbeda dalam menjaga relasi dengan kekuatan besar tersebut. Jika pihak Konservatif memiliki ikatan emosi yang kuat terhadap Inggris dalam aspek militer, ekonomi, dan budaya. Maka lain halnya dengan politisi Buruh, mereka cenderung kurang tertarik dengan anggapan pentingnya Kerajaan Inggris (Sunardi, 1985). Dikotomisasi semacam ini patut ditinjau kembali, setelah terungkapnya Skandal Penyadapan Australia-Indonesia pada 2013 maupun Eksekusi Mati *Bali Nine* atas sikap dari *Australian Labor Party* terhadap Perdana Menteri Abbott dalam mengambil kebijakan dan berinteraksi dengan pemerintah Indonesia. Melalui penelitian ini dapat menjadi *litmus test* untuk membuktikan pentingnya pengaruh kepemimpinan, keselarasan antara pernyataan politik yang disampaikan sang jago podium, dan realita fluktuasi perjalanan relasi dua hala.

Kemitraan berjalan tidak sesuai kesepakatan di awal dan harapan untuk menguntungkan kedua sisi jelas berimplikasi pada tumbuhnya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan (*mistrust*) adalah keyakinan bahwa pihak lain lebih suka mengeksploitasi kerjasama satu pihak daripada membalasnya dengan sepadan (Kydd, 2007). Sedangkan ketakutan (*fear*) sama seperti ideologi dan pandangan dunia yang membentuk persepsi individu dan berbagai pilihan kebijakan yang mereka pertimbangkan, ketakutan dapat bertindak sebagai penyaring oleh aktor institusional untuk memahami institusi atau negara lain. Penjelasan di atas menunjukkan adanya ketidakpercayaan (*mistrust*) dan ketakutan (*fear*) satu sama lain, ini mengarah pada dua pilihan apakah “reliable ally” yakni bangsa yang bersahabat sekaligus layak untuk diandalkan atau malah “potential adversary” sebagai ancaman terdekat bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott (2013—2015) akan menjadi fokus utama yang disoroti penelitian ini.

Sebetulnya telah ada dua penelitian terdahulu. Pertama, skripsi serupa terkait relasi kedua negara sudah pernah dilakukan pada 2015 oleh Dwi Ana Wiyatiningrum dari Universitas Negeri Yogyakarta, dengan mengusung judul *Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)*. Adapun kesamaan antara kajian ini dan skripsi milik Wiyatiningrum adalah pembahasan hubungan antara Indonesia-Australia, namun

tokoh sejarah dan waktu yang disorot menjadi pembeda kedua penelitian. Jika skripsi ini fokus menyoroti masa pemerintahan Tony Abbott, sedangkan Wiyatiningrum sendiri menekankan kepemimpinan Kevin Rudd.

Berikutnya penelitian Jessica dari Universitas Indonesia di tahun 2016 berjudul *Peran Media Massa dalam Hubungan Indonesia dan Australia: Studi Kasus Penyadapan Intelijen Australia terhadap Presiden Indonesia*. Baik cakupan temporal hingga topik bahasan dari tesis Jessica saling beririsan, dikarenakan masalah penyadapan yang terkuak pada 2013 adalah salah satu isu penting dalam penelitian ini. Perbedaannya adalah tulisan tersebut meninjau peran media massa terhadap hubungan kedua negara berfokus dalam kasus penyadapan Presiden Yudhoyono saja sedangkan penelitian ini berusaha meliput persoalan lebih luas, yakni sepanjang rezim Abbott berkuasa.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan sejarah, terdapat beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan. Batasan-batasan ini dari segi temporal (waktu) dan spasial (tempat). Dari segi temporal, penelitian ini membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Australia selama periode 2013—2015. Ini mengacu pada waktu dimulainya kepemimpinan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri pasca menang dalam Pemilihan Umum Federal Australia 2013. Sedangkan 2015 dipilih menjadi batas waktu pembahasan saat Perdana Menteri Abbott digantikan oleh Malcolm Turnbull. Oleh karena itu, periode yang singkat selama hampir dua tahun ini cukup penting dan menentukan bagi kemitraan Jakarta-Canberra.

Fokus spasial yang disoroti dalam penelitian adalah dua negara bertetangga, yakni Indonesia dan Australia dengan letaknya yang strategis berada di persimpangan maritim Samudera Hindia dan Pasifik. Secara *general* akan menyoroti kerjasama kedua negara mengingat fluktuasi relasi antarnegara dapat berdampak langsung pada kepentingan kedua negara khususnya di bidang politik dan keamanan.

Adapun terkait lingkup keilmuannya, skripsi ini adalah sejarah diplomatik pembahasannya menyangkut hubungan antarnegara terlebih mengenai politik-

keamanan keduanya dengan berfokus seputar dinamika hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott dalam kurun waktu 2013—2015.

## **2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada penjabaran di atas, timbul pertanyaan yang hendak dikaji berupa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi *mistrust and fear* antara Indonesia-Australia?
2. Bagaimana kondisi politik domestik Australia dan Indonesia menjelang Pemilihan Umum Federal Australia 2013 dan Pemilihan Umum Indonesia 2014?
3. Bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil Tony Abbott dalam menjalin hubungan Indonesia (2013—2015)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian adalah untuk menginformasikan, mengumpulkan bukti atas teori, dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang studi. Bagi penelitian ini tujuan yang menjadi sasaran adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait bagaimana kebijakan luar negeri Australia selama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott dalam menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia dan responnya beserta faktor penyebab terjadinya volatilitas terhadap kemitraan kedua negara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta guna menambah referensi wacana yang secara praktis dapat digunakan sebagai bahan dalam pembelajaran dan perkuliahan membahas Sejarah Indonesia khususnya mengenai hubungan bilateral dengan Australia terlebih lagi dapat menjadi rujukan bagi mata kuliah Sejarah Oseania dan Australia maupun Sejarah Politik dan Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi khalayak

umum dalam memperluas informasi maupun memberikan pemahaman historis serta memecahkan masalah saat ini, khususnya terkait isu politik luar negeri Indonesia dengan salah satu mitra terdekat yakni Australia di masa kontemporer dari tahun 2013—2015.

#### **D. Kerangka Analisis**

Paling tidak konsep geopolitik serta tingkat level analisis individu (*individual-level analysis*) digunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini. Cohen (2003) mengungkapkan bahwa geopolitik adalah analisis interaksi antara kondisi dan perspektif geografis dengan proses politik. Hal tersebut dipertimbangkan penulis, mengingat kedua belah pihak yang bertetangga baik secara geografis dan politik masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi. Indonesia dan Australia merupakan dua negara besar yang saling bertetangga, takdir geografis memungkinkan interaksi di antaranya untuk lebih intensif. Melihat kembali perbedaan mendasar dari sistem pemerintahan yang diadopsi maupun kompetisi politik domestik masing-masing negara, Indonesia memiliki sistem presidensial dimana presiden adalah kepala negara dan pemerintahan berwenang menunjuk menteri pemerintah, menyetujui undang-undang yang diadopsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Australia melalui sistem parlementer walau secara konstitusi dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil Penguasa Monarki, sentralitas peran Perdana Menteri dalam mengeksekusi kebijakan sehari-hari tidak bisa dinafikan (Hamid, 1999). Ketika Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia menjadi aktor penting dalam kekuasaan eksekutif yang mampu mengarahkan kebijakan politik mereka secara riil, maka individu pemegang jabatan tersebut akan mengomunkasikan dan mengambil keputusan sesuai gaya serta preferensi pribadi.

Nye (dalam Nohria & Khurana, 2010) mengemukakan jika kepemimpinan politik diasosiasikan namun tidak disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan justru merupakan sumber daya yang datang dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Perlu digarisbawahi jika tujuan, kemampuan, sampai kelemahan individu sangat penting

terhadap niat, kemampuan, dan strategi suatu negara, alhasil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan dan tindakan negara. Selain itu, memahami peran dan pengaruh seorang pemimpin merupakan tingkat analisis individu (*individual-level analysis*) dalam hubungan internasional. Tingkat analisis individu juga bisa digunakan untuk melihat individu bertinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri (*idiosyncratic behavior*) (Olivia, 2013). Lebih lanjut, hal ini dipertegas oleh Bass dan Stogdill (1990) jika kepemimpinan adalah interaksi antara dua atau lebih anggota suatu kelompok yang sering kali melibatkan penataan atau restrukturisasi situasi dan persepsi serta harapan para anggota. Pemimpin itu sendiri merupakan agen perubahan, pribadi yang tindakannya lebih berdampak pada orang lain dibandingkan tindakan orang lain. Pemimpin mempunyai kemampuan dalam *agenda setting*, menyusun isu-isu, dan menggunakan posisi formal mereka untuk memersuasi orang lain. Makin banyak kekuasaan terkonsentrasi pada seorang pemimpin individu (posisi dan proses kepemimpinan), maka akan semakin besar pengaruh kepribadian dan preferensi pemimpin tersebut (karakteristik pribadi, sifat, dan hasil kepemimpinan) (Byman & Pollack, 2001). Tingkat analisis ini mengambil pendekatan khusus pada Tony Abbott sebagai pembuat keputusan yang bertindak secara individual maupun dalam kelompoknya yakni Partai Liberal (LPA) mempengaruhi semua tindakan dan interaksi Australia baik dalam bentuk pernyataan maupun kebijakan terhadap Indonesia. Nantinya selain menyoroti pada tingkat elite seperti kedekatan intrapersonal masing-masing kepala pemerintahan dan pengaruh kelompok individu (partai), turut dipaparkan pula bagaimana keterlibatan dan persepsi publik yang memberikan warna tersendiri di tengah pasang surut hubungan kedua negara pada periode tersebut.

#### **E. Metode dan Bahan Sumber**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis untuk mengkaji persoalan tentang hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Metode ini diartikan sebagai sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman

dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi (Gottschalk, 1986). Terdapat empat tahapan pokok dalam metode sejarah yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).

Heuristik sebagai langkah awal dengan mencari sumber-sumber yang memiliki hubungan dan bisa mendukung penelitian. Tahap pertama ini terkait teknik bagaimana menemukan sumber yang relevan, untuk kemudian digolongkan sesuai sifatnya apakah sebagai sumber primer maupun sekunder. Dengan banyaknya variasi yang digunakan memberikan keragaman tersendiri dalam proses penulisan, sudut pandang dari berbagai tokoh maupun peristiwa dan saling mengisi sarat akan makna menjadi rujukan penting. Referensi penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Ruang Baca Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ, serta koleksi buku pribadi peneliti. Transkrip pernyataan baik hasil wawancara, pidato hingga rilis pers dari Perdana Menteri Tony Abbott pada periode 2013—2015 diperoleh melalui situs web *PM Transcripts* (<https://pmtranscripts.pmc.gov.au>) dan *National Library's Australian Government Web Archive* (<https://webarchive.nla.gov.au/awa/19980219075416/http://www.pm.gov.au/>).

Penghimpunan rujukan diperluas dengan melakukan penelusuran melalui Perpustakaan Jakarta dan Kompas Data. Sedangkan sumber yang digunakan dalam skripsi "*Mistrust and Fear: Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott (2013—2015)*" adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer terdiri dari bahan tertulis yang dihasilkan kurang lebih sezaman dengan objek penelitian dan idealnya direkam oleh saksi mata. Sumber primer memberikan kesaksian langsung atau bukti langsung mengenai topik yang sedang diselidiki dengan rentang waktu yang relatif dekat dengan topik bahasan. Sejumlah sumber primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya buku karya Tony Abbott yakni *Battlelines*. Kemudian sejumlah arsip perjanjian kedua negara yang

diakses dari situs web Treaty Room Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (<https://treaty.kemlu.go.id>) seperti *The Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation ("Lombok Treaty")* dan *Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The Lombok Treaty")* turut menjadi sumber rujukan. Pemberitaan menyangkut konflik antarnegara mendapatkan perhatian secara serius di masing-masing portal berita nasional kedua negara (dalam hal ini Antaranews.com dan ABC News Online), sehingga dijadikan referensi. Surat kabar sezaman terkait isu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia sejak 2013 hingga 2015 berupa surat kabar terdigitalisasi cukup banyak diperoleh, baik yang bersirkulasi secara lokal (*i.e.* Berita Metro, Surya, dsb.) maupun nasional (*i.e.* Tempo dan Kompas) di Indonesia dan media daring Australia (*i.e.* The Sydney Morning Herald dan The Guardian Australia).

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder terdiri dari catatan yang ditulis cukup lama setelah kejadian dan bukan oleh saksi. Sumber sekunder dibuat oleh seseorang yang tidak mengalami secara langsung atau berpartisipasi dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti, sehingga informasi dalam sumber sekunder didasarkan pada sumber lain. Sejumlah sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain *Sistem Politik Australia* oleh Zulkifli Hamid, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945—1962* karya Hilman Adil, *Linking People: Pertalian dan Interaksi Orang Australia dan Orang Indonesia* ditulis oleh Antje Missbach dan Jemma Purdey, hingga *Battleground: Why the Liberal Party Shirtfronted Tony Abbott* karya Wayne Errington dan Peter van Onselen. Terdapat sejumlah artikel ilmiah yang membahas seputar politik luar negeri Australia serta relasi dengan Indonesia, jurnal seperti *Australian Journal of International Affairs* dsb.

Berikutnya adalah kritik sumber, untuk melakukan penilaian serta penentuan otentikasi agar sumber yang digunakan tidak bias sehingga dapat terhimpun secara sistematis. Proses ini terdapat kritik ekstern dan intern, kontrol kualitas terhadap sumber seperti dokumen dan surat kabar dengan identifikasi reputasi penulis dan tidak adanya konflik kepentingan; pengecekan terhadap objektivitas dan keseimbangan sumber; memberikan informasi yang luas, rinci, dan tepat; hingga dokumentasi dan dukungan dari sumber lain. Misalnya, terkait pemberitaan Respon Pemerintah Australia terhadap Eksekusi Mati terpidana Narkoba sindikat “Bali Nine” di media nasional (seperti Antaranews.com, Kompas, dan Tempo) maupun lokal Indonesia serta portal berita daring Australia (seperti ABC News dan The Guardian Australia). Perbandingan terhadap data dari buku, jurnal, maupun arsip dilakukan guna mendapat fakta yang kredibel.

Tahap ketiga, interpretasi informasi yang berasal dari ragam sumber disatukan melalui interpretasi untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Penggambaran fakta agar masing-masing dapat ditarik keterkaitannya satu sama lain mengenai aspek secara kesejarahan maupun politik luar negeri sendiri secara mendalam. Usaha melakukan analisis atas sumber tersebut dilakukan lewat eksplanasi terhadap interelasi dan dilihat keterikatan antara yang satu dengan lainnya, sebagai contoh adanya perubahan secara cepat dan kontras dalam hubungan Indonesia-Australia dari fase bulan madu saat pemerintahan Partai Buruh (ALP) di bawah Perdana Menteri Rudd dan Gillard ke fase krisis saat pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional (LNP) pimpinan Perdana Menteri Abbott.

Terakhir, tahap penelitian ditutup setelah berhasil melakukan penafsiran peneliti sejarah kemudian menuliskan hasilnya (historiografi) dengan memperhatikan secara saksama aspek kronologi. Ini merupakan penulisan, pemaparan, atau pelaporan rekonstruksi atas fakta-fakta yang telah diinterpretasi dan penulisan dipaparkan dalam bentuk narasi sebagai hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.